

L P T

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

Jl.KH. Samanhudi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar
Telp. (0271) 495031 Fax (0271) 494043 Kode Pos 57716

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tepat pada waktunya.

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Bupati. Oleh karena itu keberhasilan Pembangunan Bidang Sosial adalah salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

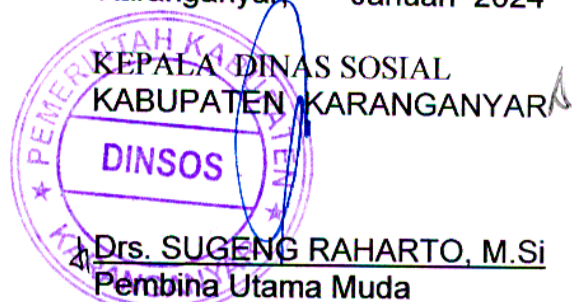
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun pada awal Tahun 2023; selain sebagai evaluasi, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja kami, baik capaian yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya.

Tugas dan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak dan instansi/unit kerja terkait, oleh karena itu kami sampaikan terima kasih.

Demikian laporan pelaksanaan tugas ini semoga bermanfaat.

Karanganyar, Januari 2024



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II. DESKRIPSI OPD	3
A. Tugas dan Fungsi	3
B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan	3
C. Standart Operating Procedure (SOP) OPD	4
D. Perda/Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan	4
E. Struktur Organisasi	5-7
F. Kepegawaian	8-10
BAB III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH.....	11
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	11-14
BAB IV. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	15
4.a Pelaksanaan urusan wajib yang berakaitan dengan Pelayanan Dasar..	15-21
BAB V. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	22
BAB VI. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	24
A. Urusan Sosial	24-42
BAB VII. INOVASI DAN PENGHARGAAN.....	43
A. INOVASI.....	43
B. PENGHARGAAN.....	43
BAB VIII. PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut maka perlu disusun laporan pelaksanaan tugas.

Disamping sebagai evaluasi, laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023..

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar. Pada Stándar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Rencana Strategi (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 s.d 2023;
10. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yaitu dalam rangka mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah dicapai dari program/kegiatan/sub.kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga diharapkan untuk tahun anggaran berikutnya pencapaian hasil program/kegiatan/sub.kegiatan yang didapatkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun anggaran saat ini dan yang lalu.

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai laporan pencapaian program dan kegiatan/ Sub. Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023. Laporan pelaksanaan tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI OPD

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas “melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati”.

Adapun fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan

Program Nasional dapat dilihat pada lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Berikut dibawah ini adalah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.

No	PROGRAM NASIONAL	DILAKSANAKAN (√) / TIDAK (x)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	x
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	x
3	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	x
4	Program Rehabilitasi Sosial	√
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	√
6	Program Pemberdayaan Sosial	√
7	Program Penanganan Fakir Miskin	x
Jumlah	7	3

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 7 program nasional yang ada, ada 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, dengan demikian ada keterkaitan antara program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Karena target dan sasaran dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar secara langsung juga mendukung target dan sasaran dari program nasional tersebut.

C. Standart Operating Procedure (SOP) OPD

Standart Operating Prosedure (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Standart Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Berikut adalah jenis SOP AP yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar :

1. SOP AP Penerimaan Tamu
2. SOP AP Pengiriman Absensi
3. SOP AP Surat Masuk
4. SOP AP Surat Keluar
5. SOP AP Pengguna Arsip Dinamis
6. SOP AP Penyusunan RKA
7. SOP AP Penyusunan DPA
8. SOP AP Pengajuan SPP/SPM GU, UP, TU
9. SOP AP Verifikasi Pertanggungjawaban Belanja
10. SOP AP Pengelolaan Barang Inventaris.
11. SOP AP Pelayanan Terhadap PGOT melalui Balai Rehabilitasi Panti Sosial dan kegiatan usaha Ekonomi Produktif.
12. SOP AP Pemohonan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia
13. SOP AP Permohonan Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
14. SOP AP Permohonan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas
15. SOP AP Administrasi Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
16. SOP AP Administrasi dan Pelayanan Pengangkatan Anak.

17. SOP AP Peserta PBI-JK dan PBPU BP Pemda.
18. SOP AP Permohonan Masyarakat Kehabisan Bekal
19. SOP AP Pemberian Bantuan Sandang dan Permakanan (SPM) Bencana Alam
20. SOP AP Ijin dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
21. SOP AP Pelayanan Pengaduan dan Non Perijinan
22. SOP AP Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi

D. Perda /Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mengacu pada peraturan perundangan yang ada agar jalannya tugas pemerintahan yang menjadi kewenangannya bisa berjalan dengan tertib dan optimal, sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan program dan kegiatan itu sendiri.

Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (APBD II) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023:
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Bagi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 94);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 2 (dua) Bidang Pelayanan Teknis dan 1

(satu) Sub. Bag Umum yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

2. SEKRETARIAT

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan rehabilitasi sosial

5. SUB. BAG UMUM

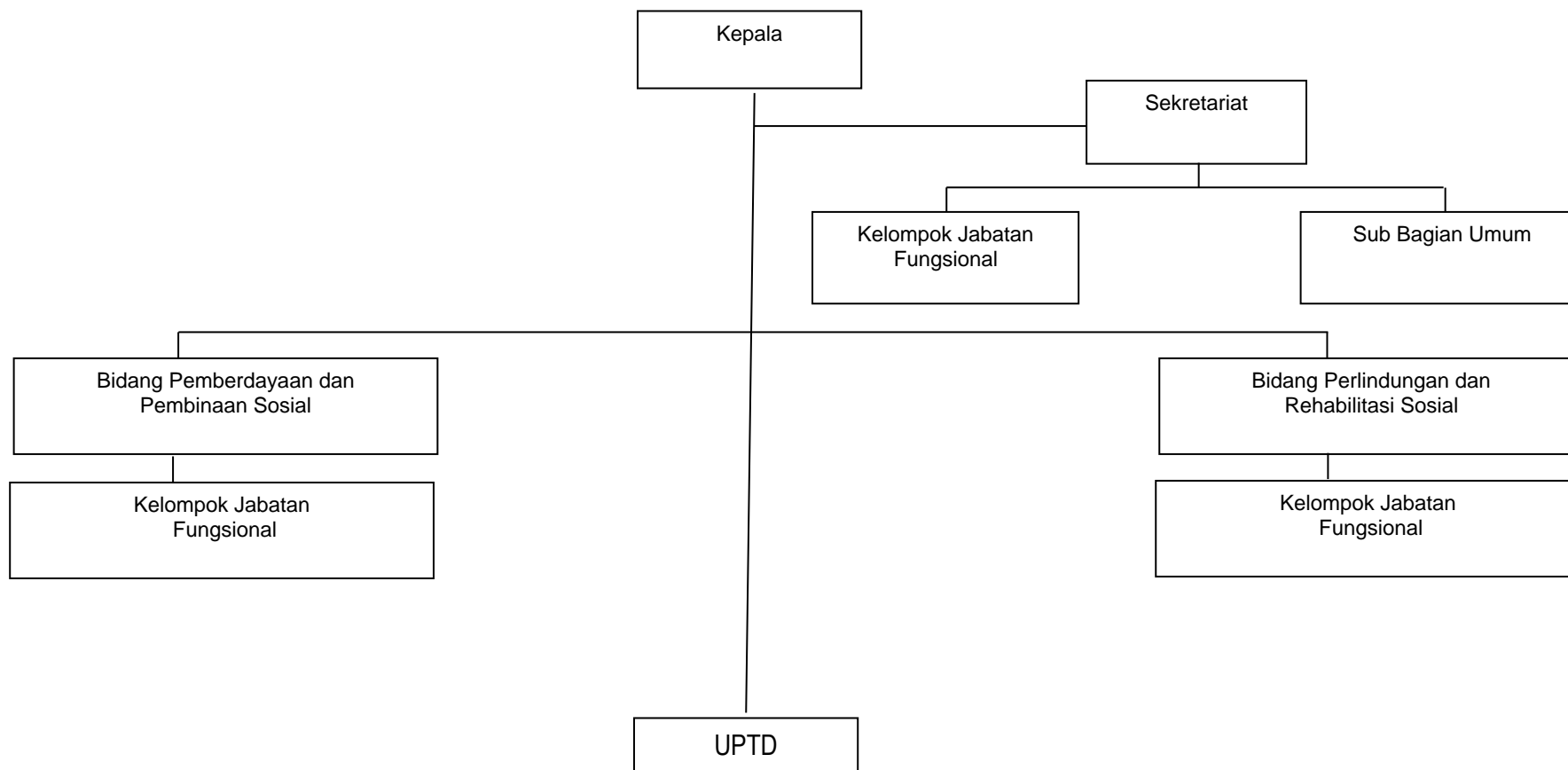
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas serta mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dinas Sosial.

6. JABATAN FUNGSIONAL.

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan Ketrampilan tertentu.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 115 Tahun 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL



F. KEPEGAWAIAN

1) DAFTAR PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT/ GOL
1.	Drs.SUGENG RAHARTO, M.S.I	'19650925 198603 1 015	PNS	IV/c
2.	SULISTYOWATI, AKS, M.M.	19690111 199203 2 009	PNS	IV/a
3.	GUNARTO, S.H.	19660323 196607 1 001	PNS	IV/a
4.	SARNO, S.KAR., MM	19670705 199403 1 013	PNS	IV/a
5.	DWI RAHAYU, SE., M.M.	19750622 199803 2 003	PNS	IV/a
6	YULI NARTATMI, S.Sos.	19670611 199103 2 017	PNS	III/d
7	WONDO, S.Sos., MM	19710222 199203 1 014	PNS	III/d
8	ENI KUSMARTUTI, S.Sos	19670311 199202 2 004	PNS	III/d
9	MARJUNI, S.Sos., M.Si.	19700827 199211 2 001	PNS	III/d
10	SRIYANTO, S.Sos.	19690726 199203 1 004	PNS	III/d
11	ENDANG SRI BUDI PATMINI	19660501 198903 2 010	PNS	III/c
12	YUSTIN SRI WURYANI	19660829 199211 2 002	PNS	III/b
13	YUDA EDI PURNOMO, S.Kom	19950913 201903 1 002	PNS	III/b
14	SAVITRI SETYANINGRUM, S.Kom	19870605 201001 2 020	PNS	III/a
15	TRİYONO	19730801 201001 1 003	PNS	II/d
16	NARIMO	19730412 200701 1 017	PNS	II/c
17	ENI HASTUTI, S.Ak.	19810408 201212 2 001	PNS	II/c
18	DWI SURYATI RENGGANI PUTRI, A.Md. Akt.	19660812 202203 2 012	PNS	II/c
19	SUKINO	19801010 200902 1 008	PNS	II/c
20	NOGAN SUTARTO	19800613 200902 1 002	PNS	II/c
21	MARIYO	19700205 200902 1 001	PNS	I/d

2) DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1.	Drs.SUGENG RAHARTO, M.S.I	Kepala Dinas	Ya	Ya
2.	SULISTYOWATI, AKS, MM.	Sekretaris	Ya	Ya
3.	.	Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	Ya	Ya
4	GUNARTO, SH.	Kabid Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	Ya	Ya
5.	DWI RAHAYU, SE, MM.	Ka Sub Bag Umum	Ya	Ya

3) DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1.	-----	-----
2.	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	-----	-----

4) DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR (umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1.	YULI NARTATMI, S.Sos	19670611 199103 2 017	Pekerja Sosial Ahli Muda
2	WONDO, S.Sos., MM	19710222 199203 1 014	Pekerja Sosial Ahli Muda
3	MARJUNI, S.Sos., MSi.	19700827 199211 2 001	Pekerja Sosial Ahli Muda
4	SAVITRI SETYANINGRUM, S.Kom	19870605 201001 2 020	Pranata Komputer Pada Dinas Sosial
5	ENI KUSMARTUTI, S.Sos	19670311 199202 2 004	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial pada Seksi Bantuan Sosial
6	SRIYANTO, S.Sos.	19690726 199203 1 004	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial.
7	ENDANG SRI BUDI PATMINI	19660501 198903 2 010	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Subbag Umum dan Kepegawaian
8	YUSTIN SRI WURYANI	19660829 199211 2 002	Pengelola Bimbingan Sosial pada Seksi Pemberdayaan Sosial
9	YUDA EDI PURNOMO, S.Kom	'19950913 2019031002	Analisis Data dan Informasi Pada Sub Bag Perencanaan dan Keuangan.
10	TRİYONO	19730801 201001 1 003	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah pada Seksi Bantuan Sosial
11	ENI HASTUTI, S.Ak.	19810408 201212 2 001	Penyusun Program anggaran dan pelaporan
12	DWI SURYATI RENGGANI PUTRI, A.Md. Akt.	19660812 202203 2 012	Verifikator Keuangan
13	NARIMO	19730412 200701 1 017	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
14	SUKINO	19801010 200902 1 008	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial pada Seksi Pemberdayaan Sosial
15	NOGAN SUTARTO	19800613 200902 1 002	Pengemudi pada Subbag Umum dan Kepegawaian
16	MARIYO	19700205 200902 1 001	Pelaksana pada Seksi Pembinaan Sosial

5) DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR YANG BELUM TERISI (umum/khusus)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Penyuluh Sosial – Ahli Muda	2
2	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	17
3	Pekerja Sosial Ahli Madya	1
4	Pekerja Sosial Ahli Muda	2
5.	Pekerja Sosial - Ahli Pertama	6
6	Arsiparis – Mahir	1
7	Perencana Ahli Muda	1
8	Pengelola Penyaluran dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia	1
9	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	1
10	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial .	1
11	Bendahara	1
12	Penata laporan Keuangan.	1
13	Pengelola Bimbingan Sosial	2
14	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	1
15	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1
16	Pengelola Rehabilitasi sosial	2
17	Pengelola Bantuan Hibah	1
18	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	1
19	Pengelola Kepegawaian	1
20	Pengelola Sarana dan Prasarana	1
21	Petugas Keamanan	2
22	Pramu Kebersihan	1
23	Pengemudi	1
24	Pramu Bhakti	1

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Sosial

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	4,00 layanan Ket.: Twiter, Facebook, Istagram, CS	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Pembilang = 134.00 orang Penyebut = 134.00 orang Hasil = 100,00
	2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	393.890,00 Orang Ket.: Jumlah DTKS			
	3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2,00 Tim Ket.: TKSK dan Tagana			
	4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	134,00 Orang Ket.:			
	5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3,00 unit Ket.: Kendaraan Rescue, Roda Empat Truk (Dapur Umum), Kendaraan Suzuki Cary			
	6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan	134,00 Orang Ket.: Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023			

	sesuai standar gizi	
7.	Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	4,00 Kamar Ket.:
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	134,00 Orang Ket.:
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	15,00 Orang Ket.:
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2,00 Buah Ket.: Kursi Roda , Kruk
11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	134,00 Paket Ket.:
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	134,00 Orang Ket.:
13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0,00 Ket.: Belum ada karena Jarak tempuh ke Rumah sakit dekat.
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan	30,00 Orang Ket.:
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,	134,00 Orang Ket.:

		mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial			10	
	16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	134,00 Orang Ket.:			
	17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	134,00 Orang Ket.:			
	18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	16,00 Orang Ket.: 10 Akses Layanan Pendidikan dan 4 Kesehatan Dasar			
	19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	134,00 Orang Ket.:			
	20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	134,00 Orang Ket.:			
	21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	11,00 Orang Ket.:			
2	1.	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	155,00 Orang Ket.:	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Pembilang = 155.00 orang Penyebut = 155.00 orang Hasil = 100,00
	2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	155,00 Orang Ket.: Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023			

3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4,00 Buah Ket.:	daerah kabupaten/ kota	11
4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	155,00 Paket Ket.:		
5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	40,00 Orang Ket.:		
6.	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	66,00 Orang Ket.:		

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 74.990.000,00 Persentase: (99,99%)	Jumlah konsumsi rapat dinas / penataran/ penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya yang tersedia. 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 182.755.600,00 Realisasi: Rp. 182.045.800,00 Persentase: (99,61%)	Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan barang dan perencanaan yang terbayar 4 orang/ bulan, Volume penyediaan ATK untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan 11 macam dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian 2 Dokumen. 2 Dokumen	2 Dokumen (100.00%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran Pelaksanaan Tugas Tahun 2020 Rp. 149.640.400,00 Realisasi:	Volume gedung kantor dinas yang dipelihara. 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

			PATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 142.574.400,00 Persentase: (95,28%)			16	
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 3.800.000,00 Realisasi: Rp. 3.800.000,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya arsip dinas yang terkelola 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Anggaran: Rp. 57.750.000,00 Realisasi: Rp. 57.750.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 267.950.000,00 Realisasi: Rp. 265.575.000,00 Persentase: (99,11%)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli dan Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan 3 Unit	3 Unit (100.00%)		

			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 12.147.800,00 Realisasi: Rp. 11.468.000,00 Persentase: (94,40%)	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)	17	
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 2.922.619.216,00 Realisasi: Rp. 2.569.501.734,00 Persentase: (87,92%)	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan	14 Bulan (100.00%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 168.000.000,00 Realisasi: Rp. 132.871.032,00 Persentase: (79,09%)	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 334.852.500,00 Realisasi: Rp. 332.332.500,00 Persentase: (99,25%) Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli 35 jenis dan jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan honorariumnya. 15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan (100.00%)		
			j. PROGRAM	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Volume	73 Unit		

			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 249.993.000,00 Realisasi: Rp. 205.381.200,00 Persentase: (82,15%)	kendaraan dinas yang terpelihara. 73 Unit	(100.00%)		18	
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 75.300.000,00 Realisasi: Rp. 63.718.000,00 Persentase: (84,62%)	Volume penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor. 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)			
				2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 22.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.873.600,00 Persentase: (72,15%)	Volume pelayanan pengiriman surat 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)			
			l. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 27.000.000,00 Realisasi: Rp. 27.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Komponen Instalasi listrik yang tersedia 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)			
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan	12 Bulan (100.00%)			

				Anggaran: Rp. 66.022.000,00 Realisasi: Rp. 66.022.000,00 Persentase: (100,00%)	Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 Bulan		19	
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 522.152.000,00 Realisasi: Rp. 496.683.577,00 Persentase: (95,12%)	Volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam dan luar negeri 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
		m	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 9.650.000,00 Realisasi: Rp. 9.650.000,00 Persentase: (100,00%)	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia. 4 Dokumen	4 Dokumen (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	SOSIAL		a. PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Anggaran: Rp. 19.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terbinanya Anggota KUBE 60 orang	60 orang (100.00%)		
				2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Anggaran: Rp. 5.659.235.700,00	Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan Masyarakat	1 paket, 1 Keluarga, 100 orang, 0 orang, 1		

				<p>Realisasi: Rp. 5.642.147.416,00 Persentase: (99,70%)</p>	<p>Rawan Sosial 1 paket, Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar 1 Keluarga, Pemberian bantuan/Fasilitas masyarakat kehabisan bekal 100 orang, Pemenuhan bantuan spontanitas 100 orang, Pendampingan program keluarga harapan (PKH) 1 paket, Terbantunya kebutuhan pangan untuk fakir miskin 300 paket, Terlaksananya kegiatan BPNT 1 kegiatan</p>	<p>paket, 300 paket, 1 kegiatan (85.71%)</p>	20	
		<p>b. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</p>	<p>1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Anggaran: Rp. 152.200.000,00 Realisasi: Rp. 152.121.400,00 Persentase: (99,95%)</p>	<p>Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar 4 orang, Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti sosial/RSJD/RSUD/ Keluarga 100 orang</p>	<p>4 orang, 100 orang (100.00%)</p>			

			Sosial	<p>2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p> <p>Anggaran: Rp. 791.795.000,00</p> <p>Realisasi: Rp. 723.383.500,00</p> <p>Persentase: (91,36%)</p>	<p>Jumlah anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 10 anak, Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 11 orang, Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 84 orang, Jumlah lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan/organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan 19 lembaga, Jumlah Penyandang Disabilitas diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 29 orang, Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar 1</p> <p>Orang, Terlaksananya</p>	<p>10 anak, 11 orang, 84 orang, 19 lembaga, 29 orang, 1 Orang, 1 kegiatan (92.86%)</p>	21	
--	--	--	--------	--	--	--	----	--

					kegiatan penyantunan anak dan keluarga 2 kegiatan		22	
			c. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Anggaran: Rp. 243.292.000,00 Realisasi: Rp. 224.579.547,00 Persentase: (92,31%)	Terlaksananya kegiatan eks penyandang penyakit kronis yang dibina 10 orang, Jumlah bimbingan sosial bagi ormas disabilitas 10 ormas, Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar 3 Orang, Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas 7 kegiatan	10 orang, 10 ormas, 3 Orang, 7 kegiatan (100.00%)		
			d. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 45.698.000,00 Realisasi: Rp. 45.698.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang terbayar 2 orang, Volume taman makam pahlawan yang terpelihara 12 bulan	2 orang, 12 bulan (100.00%)		
			e. PROGRAM PENANGANAN BENCANA, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Anggaran: Rp. 161.565.000,00 Realisasi: Rp. 160.281.250,00 Persentase: Jumlah Pelaksanaan Tugas Tahun 2023	Fasilitasi terhadap korban bencana alam dan sosial 155 KK	155 KK (100.00%)		

			dan Sosial Kabupaten/Kota	(99,21%)				
		f.	PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 1.414.912.000,00 Realisasi: Rp. 1.409.379.800,00 Persentase: (99,61%)	Berkurangnya Beban Pengeluaran KPM dalam hal pemenuhan gizi (pangan) keluarga 66 orang, Kegiatan Pembinaan dan Monitoring RTLH 50 orang, Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar 2 orang, Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 550 orang, Pemberdayaan TKSK 17 orang, Peningkatan SDM Petugas PMK 180 orang	66 orang, 50 orang, 2 orang, 550 orang, 17 orang, 180 orang (100.00%)	23	
		g.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Anggaran: Rp. 590.371.700,00 Realisasi: Rp. 576.644.700,00 Persentase: (97,67%)	Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar 1 orang, Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepalahwanan dan rasa kesetiakawanan 3 kegiatan	12 orang, 3 kegiatan (650.00%)		

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

24

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH****KABUPATEN**

No	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH**KABUPATEN**

No	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

No	Kabupaten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

BAB VI

PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar. Pada Stándar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar SPM (Stándar Pelayanan Minimal) mencakup :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara :

- a. Memberikan dukungan pelayanan / pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Anak terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat.
- b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten Dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen.

B. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

24	dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)		
----	--	---	--	--	--	--	--	--

C. Anggaran

Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		Sumber Lain yang sah
		APBN	APBD	
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluarpanti	-	105.028.090	-
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	-	45.524.000	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	-	241.340.450	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis di Luar Panti.	-	50.967.760	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	-	161.565.000	-

D. Dukungan Personil

Data Dukungan Personil

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Strata 3	0
2	Strata 2	4
3	Strata 1	29
4	SMA / Sederajat	45
Jumlah		78

**RINCIAN JUMLAH
PERSONIL**

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Personil
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Aak Terlantar di Luar Panti.	Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan	30
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial i yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota.	66
	Jumlah Personil Total		78

E. Hasil Capaian

REALISASI CAPAIAN SPM SOSIAL

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	29	29	100 %	105.028.090	103.647.160	98,69%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	10	10	100 %	45.524..000	44.232.300	97,16 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	84	84	100 %	241.340.450	240.046.650	99,46 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	11	11	100 %	50.967.760	49.276.890	96.68 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	155	155	100 %	161.565.000	160.281.250	99,21 %

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluarpanti	29	29	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	29	29	100%	20%
2	Penyediaan layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi cepat	3	3	100%	20%
3	Penyediaan Permakanan	29	29	100%	20%
4	Penyediaan Sandang	29	29	100%	20%
5	Penyediaan Alat Bantu	10	10	100%	20%
6	Penyediaan Perbekalan Keseahtan	29	29	100%	20%
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	29	29	100%	20%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada	29	29	100%	20%

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

	keluarga Penyandang Disabilitas terlantar				
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti Dokumen Kependudukan	29	29	100%	20%
10	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	2	2	100%	20%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	29	29	100%	20%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	29	29	100%	20%
13	Layanan rujukan	2	2	100%	20%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	10	10	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	10	10	100%	20%
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan/ layanan Reaksi Cepat	6	6	100 %	20%
3	Penyediaan permakanan	10	10	100%	20%
4	Penyediaan sandang	10	10	100%	20%
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10	10	100%	20%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	100%	20%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Anak Terlantar	10	10	100%	20%

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti Dokumen Kependudukan	10	10	100%	20%
9	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar/ fasilitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	10	10	100%	20%
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10	10	100%	20%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100%	20%
12	Layanan rujukan	2	2	100%	20%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	84	84	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	84	84	100%	20%
2	Penyediaan layanan kedaruratan /Layanan Reaksi Cepat	4	4	100%	20%
3	Penyediaan permakanan	84	84	100%	20%
4	Penyediaan sandang	84	84	100%	20%
5	Penyediaan alat bantu	5	5	100%	20%
6	Penyediaan Perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	84	84	100%	20%
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	84	84	100%	20%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada	84	84	100%	20%

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

	keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar				
9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	84	84	100%	20%
10	Akses ke layanan Kesehatan Dasar/ Fasilitas layanan Kesehatan	2	2	100%	20%
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	84	84	100%	20%
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	84	84	100%	20%
13	Layanan rujukan	2	2	100%	20%
	Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				100%

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	11	11	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	11	11	100%	20%
2	Penyediaan layanan kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	4	4	100%	20%
3	Penyediaan Permakanan	11	11	100%	20%
4	Penyediaan Sandang	11	11	100%	20%
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	11	11	100%	20%
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11	11	100%	20%
7	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada	11	11	100%	20%

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

	Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar				
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak/ Bukti Dokumen Kependudukan	11	11	100%	20%
9	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar / Fasilitas Layanan pendidikan dan Kesehatan	2	2	100%	20%
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	11	11	100%	20%
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11	11	100%	20%
12	Layanan rujukan	5	5	100%	20%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					100%

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap dan paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	155	155	100%	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu yang Harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu yang terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Permakanan	155	155	100%	20%
2	Penyediaan Sandang	155	155	100%	20%
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4	4	100%	20%
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	155	155	100%	20%
5	Pelayanan dukungan Psikososial	40	40	100%	20%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					100%

INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	100	Tuntas Paripurna

NO	NILAI	KATEGORI
1	100	Tuntas Paripurna
2	90 – 99	Tuntas Utama
3	80 – 89	Tuntas Madya
4	70 – 79	Tuntas Pratama
5	60 – 69	Tuntas Muda
6	< 60	Belum Tuntas

F. Kendala yang Dihadapi

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal	Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.	Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
		Kelompok Jabatan Fungsional khusus sesuai dengan Struktur Organisasi belum terisi.	Adanya tambahan Pegawai untuk mengisi formasi jabatan umum/ fungsional yang kosong
		Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan Kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.	Diadakanya Pelatihan bagi ASN/ personil yang menangani Kegiatan Pencapaian SPM.
II	Eksternal		
		Kurangnya Komunikasi dengan Instansi /Dinas lain dalam hal pencapaian SPM.	Menjalin komunikasi dengan Instansi/Dinas terkait

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	Aplikasi TEMANKOS	Sampai saat ini TEMANKOS memiliki dua menu pelayanan yang masih dapat bertambah lagi kedepannya. Dua Fitur tersebut dapat di deskripsikan sebagai berikut : 1. Layanan Disabilitas Mandiri Masyarakat dapat mengajukan bantuan/layanan secara mandiri dan dapat melihat/memantau progres usulannya melalui NIK yang didaftarkan untuk fitur ini masih difokuskan untuk penyandang Disabilitas. 2. Usulan BPPU BP Pemda (KIS - APBD) Fitur ini digunakan oleh petugas Pemutakhiran Mandiri Kemiskinan(PMK) untuk melakukan usulan/pendataan masyarakat yang membutuhkan KIS. Fitur ini bertujuan untuk memutus birokrasi yang terlalu panjang untuk masyarakat hanya perlu ke Kantor Desa/ Kelurahan terdekat untuk melakukan usulan pengajuan KIS-APBD. Aplikasi TEMANKOS dapat di Akses melalui www.temankos.karanganyarkab.go.id
2	Aplikasi TEMANKOS	Aplikasi Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial Kegunaan : 1. Untuk memilah DTKS dan Non DTKS. 2. Untuk pengusulan KIS APBD II bagi non DTKS. 3. Untuk Pengembangan bisa ditambah fitur yang lain misl Pemandanan NIK dengan Dukcapil atau pendataan PMKS lainnya (Yatim Piatu, Lansia, Disabilitas..

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Piagam Penghargaan	Ombusman RI
2	Piagam Penghargaan.	PANRB
3	Piagam Penghargaan Juara 5	Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Bupati Karanganyar
4	Piagam Penghargaan Juara Harapan 3	Bupati Karanganyar
5	Piagam Apresiasi	Staf Khusus Presiden RI (Angkie Yudistia)
6	Piagam Penghargaan Juara 6	Bupati Karanganyar

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mempunyai wewenang dalam Pelaksanaan Urusan Sosial di Bidang Sosial.

Jenis Standar Pelayanan Dasar di Dinas Sosial mencakup:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.

Dari ke-5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai target yang ditentukan dan capaian 100 %, semua jumlah Mutu/Barang/Jasa/SDM dapat terisi semua , namun untuk Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan / atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen Kependudukan belum dianggarkan karena jarak tempuh Dinas Sosial ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sangat dekat dan untuk pengurusan Dokumen Kependudukan Gratis.

Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Program Kerja dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Anggaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 lebih diprioritaskan untuk Pelayanan Dasar (SPM), agar setiap tahapan pelaksanaan SPM bisa berjalan baik sesuai amanat Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 ,dan untuk SDM di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk jabatan Fungsional / Pelaksana yang masih kosong untuk segera dapat diisi sehingga semua tahapan dari proses pendataan sampai dengan proses penyaluran dapat dilaksanakan dengan baik dan Jumlah mutu Barang/jasa/SDM bisa teranggarkan semua dan perlu diadakan pelatihan untuk Pegawai yang menangani SPM agar tidak ada kendala dalam penerapan SPM khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

DINSOS

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19650925198603 1 015